

## **ABSTRAK**

Sebagai pejabat umum, maka peran Notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi. Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya jabatan Notaris terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta waris menurut hukum positif saat ini, untuk mengetahui perbuatan yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta waris yang merupakan tindak pidana dan mengetahui akibat hukum jika Notaris dalam pembuatan akta waris melakukan tindak pidana, penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan analisis kualitatif yuridis yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. Perbuatan tindak pidana yang mungkin dilakukan dalam pembuatan akta waris adalah Pasal 263 ayat 1: tindak pidana pemalsuan dokumen, Pasal 263 ayat 2: memakai surat palsu, Pasal 264 ayat 1: Tindak pidana pemalsuan akta otentik, Pasal 264 ayat 2: Tindak pidana memakai akta otentik palsu/dipalsukan, Pasal 266 ayat 1: Tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, Pasal 266 ayat 2: Tindak pidana memakai akta otentik palsu, Pasal 55: Tindak pidana psenyertaan/turut serta. Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana dapat dikenakan sanksi karena memenuhi unsur-unsur pidana yang bersifat melawan hukum pasal 1365. Akibat hukum dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta warisa apabila terbukti bersalah berupa sanksi perdata (sanksi administratif) terdapat pada pasal 85 UUJN dan sanksi pidana menurut KUHPidana.

**Kata Kunci:** Peran Notaris, Perbuatan Tindak Pidana, Akibat Hukum Tindak Pidana

## ABSTRACT

As a general official, the role of Notary is to serve the interests of the community in relation to running his profession which is always oriented to the interests of the community. In this case, the Notary represents the state in carrying out his position with full responsibility and appreciate the overall dignity of his position as a profession. In the explanation of the Notary Position Act, it is explained the importance of the position of Notary related to the making of an authentic deed. There is an authentic deed that is required by laws and regulations in the framework of certainty, order and legal protection. Authentic deed made by or before a Notary, not only because it is required by legislation, but also because it is desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for certainty, order, and legal protection for interested parties as well as for society as a whole.

The purpose of this study was to determine the role and responsibility of the Notary in making the inheritance certificate according to the current positive law, to find out the actions that may be carried out by the Notary in making an inheritance deed which is a criminal act and knowing the legal consequences if the Notary in making the inheritance deed commits a crime , this research is a normative research that uses juridical qualitative analysis that uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are using literature study by collecting all documents, literature, and legislation related to this research. Criminal acts that may be carried out in the making of inheritance are Article 263 paragraph 1: criminal acts of forgery documen, Article 263 paragraph 2: using fake letters, Article 264 paragraph 1: Criminal falsification authentic deed, Article 264 paragraph 2: Criminal acts using a deed authentic fake / falsified, Article 266ayat 1: Criminal acts include false information in authentic deed, Article 266 paragraph 2: Criminal acts using a fake authentic deed, Article 55: Crime of participation / participation. Every act that is a criminal act can be subject to sanctions because it fulfills the criminal elements that are against the law Article 1365. The legal consequences of criminal acts committed by a Notary in making inheritance deeds if proven guilty in the form of civil sanctions (administrative sanctions) are contained in article 85 UUJN and criminal sanctions according to the Criminal Code.

Keywords: The Role of Notary, Criminal Acts, Due to Criminal Law